

DESA SADAR KERUKUNAN SEBAGAI MEKANISME TRANSFORMASI MODERASI BERAGAMA MENUJU KOHESI SOSIAL PADA MASYARAKAT MULTIETNIS: STUDI KASUS DESA KERTA BUANA

Amin Nasrullah¹, Sofian Efendi²

FAI Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Kalimantan Timur, Indonesia

Email: aminnasrullah@unikarta.ac.id¹, sofianefendi6876@gmail.com²

Abstract

This study explains the social mechanism through which religious moderation is transformed into social cohesion in a multiethnic community, using the Religious Harmony Awareness Village program in Kerta Buana Village, Kutai Kartanegara, as an explanatory case. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and document analysis involving purposively selected government actors, village officials, religious leaders, community leaders, and participating residents. Analysis followed an interactive qualitative logic of data condensation, data display, conclusion verification, thematic categorization, and explanation building through dialogue between empirical evidence and theory. The findings identify a staged mechanism: shared meaning construction, value internalization, collective consciousness formation, social capital strengthening, and institutional collaboration. Based on this synthesis, the study proposes the Moderation Internalization through Desa Sadar Kerukunan (MIDSK) Framework as a case-based middle-range explanatory framework linking religious moderation as a normative input to social cohesion as a social outcome. The framework emphasizes that cohesion is not produced directly by normative moderation discourse, but through relational and institutional processes that reproduce shared values. Because the study is based on a single strategic case, the framework is intended for analytic rather than statistical generalization and requires cross-case testing.

Keywords: *Religious Moderation, Social Cohesion, Social Transformation, Multiethnic Society, MIDSK Framework*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mekanisme sosial yang mentransformasikan moderasi beragama menjadi kohesi sosial pada masyarakat multietnis dengan menjadikan Program Desa Sadar Kerukunan di Desa Kerta Buana, Kutai Kartanegara, sebagai explanatory case. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan unsur pemerintah, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga yang dipilih secara purposif. Analisis mengikuti logika kualitatif interaktif berupa kondensasi data, penyajian data, verifikasi kesimpulan, kategorisasi tema, dan explanation building melalui dialog antara bukti empiris dan teori. Hasil penelitian mengidentifikasi mekanisme bertahap yang meliputi konstruksi makna bersama, internalisasi nilai, pembentukan kesadaran kolektif, penguatan modal sosial, dan kolaborasi kelembagaan. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian mengajukan Moderation Internalization through Desa Sadar Kerukunan (MIDSK) Framework sebagai kerangka eksplanatoris tingkat menengah berbasis kasus yang menghubungkan moderasi beragama sebagai normative input dengan kohesi sosial sebagai social outcome. Kerangka ini menegaskan bahwa kohesi tidak lahir secara langsung dari wacana normatif moderasi, tetapi melalui proses relasional dan kelembagaan yang mereproduksi nilai bersama. Karena bertumpu pada satu kasus strategis, kerangka ini ditujukan untuk generalisasi analitis, bukan statistik, dan memerlukan pengujian lintas kasus.

Keywords: *Moderasi Beragama, Kohesi Sosial, Transformasi Sosial, Masyarakat Multietnis, MIDSK Framework*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia ditandai oleh keberagaman agama, etnis, budaya, dan tradisi yang menjadikannya sebagai salah satu masyarakat paling plural di dunia. Keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis. Dalam konteks demikian, moderasi beragama berkembang sebagai paradigma yang menempatkan penghormatan terhadap keberagaman, keseimbangan, keadilan, dan dialog sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial.¹

Perkembangan tersebut diikuti oleh meningkatnya perhatian akademik terhadap hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial. Berbagai

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15–27.

penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki kontribusi terhadap penguatan toleransi, harmoni sosial, serta kemampuan masyarakat mengelola keberagaman melalui dialog dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Kepemimpinan tokoh agama, dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan forum dialog merupakan faktor-faktor yang berperan dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif.² Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa moderasi beragama bukan sekadar sikap individual, melainkan proses sosial yang melibatkan berbagai institusi dan aktor masyarakat.

Kajian mengenai moderasi beragama telah berkembang dari pendekatan normatif menuju pendekatan sosiologis yang memandang moderasi sebagai praktik sosial dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang dan praktik keberagamaan yang menekankan keseimbangan (*tawāzun*), keadilan (*i'tidāl*), toleransi (*tasāmuh*), penghormatan terhadap keberagaman, dan komitmen kebangsaan.³ Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa moderasi tidak hanya berkaitan dengan sikap individu, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial, kepemimpinan lokal, dialog lintas agama, dan kolaborasi antarlembaga sehingga menjadi bagian dari budaya hidup bersama.⁴

Namun demikian, perkembangan kajian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penjelasan teoretis mengenai bagaimana nilai moderasi bekerja dalam kehidupan sosial. Pada literatur yang ditelaah dalam penelitian ini, perhatian lebih banyak diarahkan pada tingkat toleransi, efektivitas program, atau hubungan moderasi dengan harmoni sosial. Penjelasan mengenai mekanisme yang menghubungkan konstruksi dan internalisasi nilai dengan terbentuknya kohesi

² Achmad Abidin & Izzul Fatawi, "Leadership of Religious Leaders in the Framework of Religious Moderation in Strengthening Community Social Cohesion," *IJMURHICA*, 7(4) (2024): 266–277; Ibnu Sholeh dan Siti Fatinnah, "Strengthening Religious Moderation to Promote Social Cohesion and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies," *MUNIF: International Journal of Religion Moderation*, 1(1) (2025): 1–19; Rasyidi, Saiban, & Rozikin, "Building an Inclusive Society through Religious Moderation Village: Phenomenological Study of the Role of Social Capital in Building Social Harmonization in the Community of Sidodadi Village," *IJRSS* 6(6) (2025): 151-175.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 17–24.

⁴ Lihat Muhammad Maulana et al, "Unity in Diversity: Examining Religious Moderation across Religions in Indonesia," *Dialog* 47, no. 1 (2024): 62–64; Abidin & Fatawi, "Leadership of Religious Leaders in the Framework of Religious Moderation in Strengthening Community Social Cohesion," *IJMURHICA*, 7(4) (2024): 266–277.

sosial pada tingkat komunitas masih relatif terbatas. Dengan demikian, hubungan moderasi beragama dan kohesi sosial lebih sering dibaca pada tingkat hasil (outcome), sedangkan proses sosial yang menjembatannya memerlukan elaborasi lebih lanjut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Chan, To, dan Chan, kohesi sosial bukan sekadar kondisi harmonis dalam masyarakat, tetapi merupakan hasil dari proses pembentukan kepercayaan, identitas bersama, dan partisipasi sosial.⁵ Perkembangan konseptual tentang kohesi sosial terlihat dalam pandangan Schiefer dan van der Noll, yang menegaskan bahwa kohesi sosial harus dipahami sebagai proses multidimensional yang melibatkan interaksi, rasa memiliki (*sense of belonging*), solidaritas, serta komitmen terhadap tujuan bersama.⁶ Dengan demikian, hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial memerlukan penjelasan yang tidak hanya menjawab apakah keduanya berkaitan, tetapi juga bagaimana hubungan tersebut terbentuk.

Pertanyaan tersebut membawa penelitian ini pada tradisi sosiologi yang berusaha menjelaskan proses terbentuknya realitas sosial. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, persoalan tersebut penting karena nilai tidak pernah bekerja secara otomatis dalam kehidupan masyarakat. Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial tidak hadir secara alamiah, tetapi dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁷ Melalui proses tersebut, nilai-nilai yang pada awalnya dipahami sebagai pengalaman subjektif berkembang menjadi kenyataan sosial yang memperoleh legitimasi dalam kehidupan bersama. Perspektif ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bahwa nilai moderasi beragama tidak otomatis menghasilkan kohesi sosial, melainkan harus melalui proses konstruksi makna yang berlangsung dalam interaksi sosial masyarakat.

Namun, konstruksi makna saja belum cukup menjelaskan mengapa masyarakat kemudian mampu mempertahankan keteraturan sosial secara

⁵ Joseph Chan, Ho-Pong To, and Elaine Chan, "Reconsidering Social Cohesion: Developing a Definition and Analytical Framework for Empirical Research," *Social Indicators Research* 75, no. 2 (2006): 289–292.

⁶ David Schiefer and Jolanda van der Noll, "The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review," *Social Indicators Research* 132, no. 2 (2017): 581–586.

⁷ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books, 1966), 60–82.

berkelanjutan. Di sini, Durkheim memberikan perspektif, bahwa keteraturan sosial bertumpu pada berkembangnya *collective conscience*, yaitu seperangkat nilai dan keyakinan bersama yang menjadi dasar moral bagi kehidupan kolektif.⁸ Kesadaran kolektif memungkinkan individu memandang kepentingan bersama sebagai sesuatu yang mengikat tindakan sosial mereka. Dengan demikian, konstruksi sosial sebagaimana dijelaskan Berger dan Luckmann dan konsep *collective conscience* yang dikembangkan Durkheim sesungguhnya menjelaskan dua tahapan yang berbeda dalam proses transformasi sosial; yang pertama menjelaskan bagaimana makna dibentuk, sedangkan yang kedua menjelaskan bagaimana makna tersebut memperoleh legitimasi sebagai norma bersama.

Tahapan berikutnya dijelaskan oleh teori modal sosial. Coleman berpendapat bahwa tindakan kolektif hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki hubungan sosial yang melahirkan kepercayaan, kewajiban timbal balik, dan norma resiprositas.⁹ Pandangan tersebut diperluas oleh Putnam yang menempatkan kepercayaan sosial, partisipasi warga, dan jejaring sosial sebagai fondasi keberhasilan kerjasama dalam masyarakat demokratis.¹⁰ Sementara itu, Woolcock menegaskan bahwa masyarakat plural memerlukan tidak hanya *bonding social capital*, tetapi juga *bridging* dan *linking social capital* agar hubungan antarkelompok maupun hubungan dengan institusi dapat berkembang secara produktif.¹¹ Meskipun ketiga perspektif tersebut menjelaskan dimensi yang berbeda dari modal sosial, seluruhnya menunjukkan bahwa kohesi sosial merupakan hasil dari kapasitas relasional masyarakat yang dibangun melalui interaksi yang berulang, bukan sekadar akibat dari kesamaan identitas.

Di sisi lain, perkembangan kajian *collaborative governance* memberikan perspektif bahwa transformasi sosial memerlukan ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa proses

⁸ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, terj. W. D. Halls (New York: Free Press, 1984), 70-130.

⁹ James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94 (1988): S95-S120, khususnya S98-S101.

¹⁰ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (Princeton: Princeton University Press, 1993), 163-185. Lihat juga Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), 18-28.

¹¹ Michael Woolcock, "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework," *Theory and Society* 27, no. 2 (1998): 151-208, khususnya hlm. 155-170.

kolaboratif berkembang melalui dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, serta terbentuknya pemahaman bersama (*shared understanding*).¹² Emerson, Nabatchi, dan Balogh kemudian memperluas perspektif tersebut melalui konsep *collaborative dynamics*, yaitu proses interaksi yang menghasilkan keterlibatan bersama (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), dan kapasitas untuk bertindak secara kolektif (*capacity for joint action*).¹³ Kedua perspektif ini memberikan penjelasan penting mengenai bagaimana ruang kolaborasi dapat menjadi wahana transformasi nilai menjadi praktik sosial yang berkelanjutan.

Sebagai konklusi sintetis, telaah terhadap berbagai perspektif teoritis menunjukkan bahwa setiap teori memberikan kontribusi penting, tetapi hanya menjelaskan sebagian (secara terpisah) dari keseluruhan mekanisme transformasi sosial. Berger dan Luckmann membantu memahami bagaimana nilai memperoleh makna sosial melalui proses konstruksi. Durkheim menjelaskan bagaimana makna tersebut berkembang menjadi kesadaran kolektif yang memperoleh legitimasi moral. Coleman, Putnam, dan Woolcock menerangkan bagaimana kesadaran kolektif diterjemahkan ke dalam jaringan kepercayaan, norma resiprositas, serta hubungan sosial yang menopang tindakan bersama. Selanjutnya, Ansell dan Gash, serta Emerson dkk. menunjukkan bagaimana tindakan bersama tersebut dipelihara melalui tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor dalam ruang dialog yang terorganisasi.

Meskipun saling melengkapi, literatur tentang moderasi beragama, konstruksi sosial, solidaritas sosial, modal sosial, dan *collaborative governance* berkembang dalam jalur kajian yang relatif terpisah. Pada sumber-sumber yang ditelaah, masih terbatas upaya yang menghubungkan pembentukan makna, internalisasi nilai, kesadaran kolektif, kapasitas relasional, dan tata kelola kolaboratif ke dalam satu mekanisme transformasi sosial. Kesenjangan

¹² Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571, khususnya hlm. 550–561.

¹³ Lihat juga Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29.

eksplanatoris inilah yang menjadi titik tolak penelitian untuk mengintegrasikan perspektif tersebut secara bertahap dan mengujinya melalui satu kasus strategis.

Program Desa Sadar Kerukunan di Desa Kerta Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan konteks empiris yang relevan untuk menjawab kesenjangan tersebut. Sebagai desa yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis dan agama yang beragam, Desa Kerta Buana memperlihatkan dinamika sosial yang memungkinkan penelusuran terhadap proses transformasi nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Implementasi program ini tidak hanya melibatkan pemerintah desa, Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, tetapi juga membangun ruang dialog yang memungkinkan berbagai aktor mengonstruksi makna bersama mengenai pentingnya menjaga kerukunan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang Desa Sadar Kerukunan bukan sekadar sebagai program pemerintah, melainkan sebagai arena sosial tempat berlangsungnya proses transformasi nilai menuju kohesi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: melalui mekanisme sosial apa nilai moderasi beragama bertransformasi menjadi kohesi sosial dalam masyarakat multietnis? Penelitian menggunakan studi kasus eksplanatoris dan mengintegrasikan perspektif konstruksi sosial, solidaritas sosial, modal sosial, dan collaborative governance. Berdasarkan dialog antara temuan empiris dan perspektif tersebut, penelitian menawarkan Moderation Internalization through Desa Sadar Kerukunan (MIDSK) Framework sebagai middle-range explanatory framework berbasis kasus. Kontribusi utamanya bukan sekadar menegaskan pentingnya moderasi bagi kerukunan, melainkan menjelaskan tahapan sosial yang memungkinkan nilai moderasi bertransformasi menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial berlangsung melalui proses konstruksi sosial yang kompleks. Nilai-nilai moderasi tidak serta-merta menghasilkan kohesi sosial, tetapi terlebih dahulu dikonstruksi sebagai makna bersama, diinternalisasi menjadi norma sosial, membentuk kesadaran kolektif, memperkuat modal sosial, dan memperoleh legitimasi melalui kolaborasi berbagai aktor sebelum termanifestasi sebagai kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini tidak hanya

berupaya menjelaskan hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial, tetapi juga menguraikan mekanisme transformasi sosial yang menghubungkan keduanya.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris (*explanatory case study*). Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak diarahkan untuk mengukur hubungan antarvariabel ataupun menguji hipotesis, melainkan untuk menjelaskan mekanisme sosial yang memungkinkan nilai moderasi beragama bertransformasi menjadi kohesi sosial dalam konteks masyarakat multietnis. Menurut Yin, studi kasus eksplanatoris digunakan ketika penelitian berusaha menjawab pertanyaan "how" dan "why" mengenai suatu fenomena yang kompleks, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks sosialnya tidak dapat dipisahkan secara tegas.¹⁴ Oleh karena itu, pendekatan ini dipandang sesuai untuk menelaah proses transformasi sosial yang berlangsung melalui interaksi berbagai aktor dalam Program Desa Sadar Kerukunan.

Pilihan terhadap studi kasus juga didasarkan pada pertimbangan bahwa kohesi sosial merupakan fenomena yang berkembang melalui hubungan sosial yang kontekstual.¹⁵ Sebagaimana dikemukakan Stake, studi kasus memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara mendalam melalui keterkaitannya dengan konteks kehidupan nyata.¹⁶ Dalam penelitian ini, Desa Kerta Buana tidak diposisikan sebagai representasi statistik dari seluruh desa multietnis di Indonesia, tetapi sebagai kasus strategis (*strategic case*) yang memungkinkan penelusuran secara rinci terhadap mekanisme internalisasi nilai moderasi beragama dalam konteks sosial yang kompleks.

Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan pada generalisasi populasi (*statistical generalization*), melainkan pada generalisasi analitis (*analytic*

¹⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE, 2018), 45–68.

¹⁵ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), 42–45.

¹⁶ Robert E. Stake, *The Art of Case Study Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995), 1–12.

generalization), yaitu pengembangan penjelasan konseptual yang dapat memperkaya teori mengenai hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial sebagaimana dijelaskan oleh Yin.¹⁷ Posisi ini sejalan dengan tujuan penelitian yang berupaya menyusun suatu kerangka eksplanatoris tingkat menengah (*middle-range explanatory framework*), bukan menghasilkan hukum universal yang berlaku pada seluruh konteks sosial.

2. Lokasi dan Konteks Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kerta Buana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, agama, dan latar belakang sosial yang hidup dalam interaksi sehari-hari secara relatif harmonis. Keberagaman tersebut menjadikan Desa Kerta Buana sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji bagaimana nilai moderasi beragama diinternalisasi dan ditransformasikan menjadi praktik sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.

Selain karakteristik sosial tersebut, desa ini juga menjadi lokasi implementasi Program Desa Sadar Kerukunan,¹⁸ yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai aktor tersebut memungkinkan penelitian mengamati secara langsung proses dialog, negosiasi makna, pembentukan kepercayaan, dan pengembangan kerja sama lintas kelompok sebagai bagian dari mekanisme transformasi sosial yang menjadi fokus penelitian.

Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian tidak semata-mata didasarkan pada keberhasilan program, tetapi pada kapasitas kasus tersebut untuk memperlihatkan secara jelas proses sosial yang hendak dijelaskan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip *information-rich case* yang dikemukakan Patton, yaitu memilih kasus yang memiliki potensi memberikan informasi paling mendalam

¹⁷ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE, 2018), 38–44.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Desa Sadar Kerukunan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, tahun 2025), 3–7.

terhadap persoalan penelitian.¹⁹

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan tiga pertimbangan: memiliki pengetahuan tentang dinamika kerukunan di Desa Kerta Buana, memiliki pengalaman dalam interaksi sosial lintas kelompok, atau terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Desa Sadar Kerukunan. Strategi ini diarahkan untuk memperoleh information-rich data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Jumlah informan tidak digunakan sebagai dasar generalisasi statistik; kecukupan data ditentukan oleh kedalaman dan keterkaitan informasi dengan mekanisme sosial yang dianalisis.

Kelompok informan mencakup unsur pemerintah yang membina kehidupan keagamaan, aparat pemerintah desa, tokoh agama dari berbagai komunitas, tokoh masyarakat, serta warga yang berpartisipasi dalam kegiatan Desa Sadar Kerukunan. Keragaman perspektif tersebut digunakan untuk membandingkan cara para aktor memaknai moderasi, kerukunan, kepercayaan, dan kolaborasi. Penelitian menekankan kecukupan dan kedalaman informasi daripada jumlah informan, sehingga interpretasi diarahkan pada rekonstruksi mekanisme sosial dan bukan pada perbandingan kuantitatif antaraktor.

Penelitian ini tidak bertujuan membandingkan pandangan antaraktor secara kuantitatif, tetapi merekonstruksi mekanisme sosial berdasarkan pengalaman kolektif yang muncul dari berbagai perspektif tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian utama bukan jumlah informan, melainkan kedalaman informasi yang diperoleh serta keterkaitannya dengan pertanyaan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang digunakan secara saling melengkapi sebagai methodological triangulation. Observasi diarahkan pada pola interaksi dan praktik kolaboratif yang berkaitan dengan Program Desa Sadar Kerukunan; wawancara menggali pengalaman, pemaknaan, dan refleksi para aktor; sedangkan dokumentasi

¹⁹ Lihat Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE, 2015), 264–267.

digunakan untuk memeriksa dokumen program, laporan kegiatan, dan dokumen kelembagaan yang relevan. Kombinasi ketiga sumber bukti digunakan untuk memperkuat kredibilitas interpretasi dan menghindari ketergantungan pada satu jenis data.

Fokus pengumpulan data tidak diarahkan pada pencatatan aktivitas program semata, melainkan pada identifikasi mekanisme sosial yang menjelaskan bagaimana nilai moderasi beragama dipahami, dinegosiasikan, diterima, dan diwujudkan dalam tindakan kolektif masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara iteratif. Data wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan atau diorganisasikan, kemudian melalui coding awal untuk mengidentifikasi unit makna yang berkaitan dengan pemaknaan moderasi, internalisasi nilai, kesadaran kolektif, kepercayaan, jaringan kerja sama, dan kolaborasi kelembagaan. Kode-kode yang memiliki kedekatan makna dikelompokkan menjadi kategori dan tema. Proses tersebut mengikuti logika Miles, Huberman, dan Saldaña melalui data condensation, data display, serta drawing and verifying conclusions. Hubungan antartema kemudian diperiksa kembali melalui perbandingan antarsumber dan antarkategori.

Analisis tidak berhenti pada identifikasi tema empiris, tetapi dilanjutkan dengan explanation building melalui dialog berulang antara data dan kerangka teoretis. Perspektif Berger dan Luckmann, Durkheim, Coleman-Putnam-Woolcock, serta collaborative governance digunakan sebagai lensa untuk menjelaskan hubungan antartema, bukan sebagai kategori yang dipaksakan sejak awal. Melalui proses ini, urutan konstruksi makna, internalisasi, kesadaran kolektif, modal sosial, dan pelebagaan kolaborasi diperlakukan sebagai sintesis analitis yang harus tetap dibaca dalam batas generalisasi analitis satu kasus strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Moderasi Beragama sebagai Konstruksi Makna Bersama

Berdasarkan triangulasi wawancara, observasi, dan dokumen program, Program Desa Sadar Kerukunan di Desa Kerta Buana tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosialisasi mengenai moderasi beragama, tetapi menjadi ruang

sosial yang mempertemukan berbagai aktor untuk membangun pemahaman bersama mengenai kehidupan harmonis dalam masyarakat multietnis. Forum yang mempertemukan unsur Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga menyediakan ruang bagi kelompok yang berbeda untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan harapan mengenai kerukunan. Dalam proses tersebut, moderasi beragama dipahami bukan semata sebagai konsep yang datang dari luar masyarakat, tetapi sebagai nilai yang dibicarakan, dinegosiasikan, dan dimaknai bersama.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa moderasi beragama di Desa Kerta Buana tidak dipahami semata-mata sebagai konsep normatif yang diperkenalkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi sebagai makna bersama yang dibangun melalui interaksi berulang antarmasyarakat, tokoh agama, pemerintah desa, dan berbagai institusi sosial. Dalam proses tersebut, nilai-nilai seperti saling menghormati, kerja sama, dan penyelesaian perbedaan melalui dialog memperoleh legitimasi sosial sehingga diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.²⁰ Nilai moderasi beragama dalam konteks penelitian ini tidak berhenti sebagai gagasan normatif, tetapi mengalami proses objektivasi melalui praktik sosial dan kemudian diinternalisasi menjadi pedoman tindakan bersama. Penelitian-penelitian mutakhir mengenai moderasi beragama di Indonesia juga menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan moderasi sangat dipengaruhi oleh proses interaksi sosial yang melibatkan berbagai aktor lokal, meskipun sebagian besar belum menguraikan secara rinci mekanisme konstruksi makna tersebut.²¹ Setiap aktor membawa pengalaman sosialnya

²⁰ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Anchor Books, 1966), 60–82.

²¹ Lihat misalnya, penelitian Muhammad Maulana et al, "Unity in Diversity: Examining Religious Moderation across Religions in Indonesia," *Dialog* 47, no. 1 (2024): 62–64; Ibnu Sholeh & Siti Fatinnah, "Strengthening Religious Moderation to Promote Social Cohesion and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies," *MUNIF: International Journal of Religion Moderation*, 1(1) (2025): 1–19; Achmad Abidin & Izzul Fatawi, "Leadership of Religious Leaders in the Framework of Religious Moderation in Strengthening Community Social Cohesion," *IJMURHICA*, 7(4) (2024): 266–277; Rasyidi, Saiban, & Rozikin, "Building an Inclusive Society through Religious Moderation Village: Phenomenological Study of the Role of

masing-masing mengenai kehidupan dalam masyarakat yang majemuk, kemudian mengartikulasikannya melalui dialog yang berlangsung dalam forum bersama. Menariknya, perbedaan pengalaman tersebut tidak berkembang menjadi kompetisi makna, tetapi justru menjadi sumber pembelajaran bersama yang memperkaya pemahaman kolektif mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Dalam berbagai pernyataan yang muncul selama kegiatan, para pemangku kepentingan secara konsisten menekankan bahwa kerukunan bukan hanya kondisi yang perlu dipertahankan, tetapi merupakan prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan sosial di tengah keberagaman etnis dan agama. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama mulai bergeser dari sekadar nilai normatif menjadi orientasi bersama yang memperoleh pengakuan sosial. Dengan kata lain, forum kolaboratif telah berfungsi sebagai ruang tempat masyarakat mengonstruksi makna baru mengenai hubungan antarumat beragama.

Temuan ini memperluas penjelasan Berger dan Luckmann.²² Jika konstruksi sosial dalam formulasi klasik terutama dijelaskan melalui interaksi sehari-hari, penelitian ini menunjukkan bahwa forum kolaboratif yang difasilitasi oleh institusi publik juga dapat menjadi arena konstruksi realitas sosial. Dalam konteks Desa Sadar Kerukunan, dialog yang diselenggarakan secara terencana mempercepat proses pertukaran makna sehingga nilai moderasi beragama lebih cepat memperoleh pemahaman kolektif. Dengan demikian, institusi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator konstruksi sosial.

Lebih jauh lagi, proses konstruksi tersebut tidak berhenti pada terbentuknya pemahaman bersama. Berbagai aktor mulai menggunakan istilah, narasi, dan cara pandang yang relatif serupa ketika menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan dalam masyarakat multietnis. Keseragaman orientasi tersebut menunjukkan bahwa hasil dialog tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi

Social Capital in Building Social Harmonization in the Community of Sidodadi Village,” *IJRSS* 6(6) (2025): 151-175; Khoiruddin Zuhri et al, “Tolerance From Below: Grassroots Movement and Interfaith Collaboration for Religious Moderation in Indonesia,” *Jurnal Penelitian*, 21(1) (2024): 1-16; Yaoping Liu, Chatchai Rakthin, & Langgeng Budianto, “Religious Moderation and Community Cohesion: Exploring Social Memory, Identity, and Solidarity in the Phu Khao Thong Muslim Community, Ayutthaya,” *Millah: Journal of Religious Studies*, 24(1), (2025): 379–392.

²² Lihat terutama Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Anchor Books, 1966), 60–82.

mulai membentuk kerangka interpretasi bersama terhadap realitas sosial. Pada tahap inilah proses objektivasi mulai berlangsung, yaitu ketika makna yang sebelumnya dinegosiasikan berkembang menjadi kenyataan sosial yang diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat.²³

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Program Desa Sadar Kerukunan tidak terutama terletak pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada kemampuannya menyediakan arena sosial tempat berlangsungnya konstruksi makna secara kolektif. Temuan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa efektivitas program penguatan moderasi beragama tidak dapat diukur hanya melalui indikator administratif, melainkan juga melalui kapasitasnya membangun ruang dialog yang memungkinkan masyarakat menghasilkan definisi bersama mengenai pentingnya hidup dalam kerukunan.

2. Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dan Pembentukan Kesadaran

Kolektif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama tidak berhenti pada tingkat pemahaman, tetapi berkembang menjadi norma sosial yang dihayati oleh masyarakat. Proses dialog yang berlangsung dalam Program Desa Sadar Kerukunan tidak berhenti pada pertukaran gagasan mengenai pentingnya hidup berdampingan secara damai. Keterlibatan tokoh agama, pemerintah desa, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat dalam berbagai forum dialog menjadikan nilai-nilai tersebut memperoleh legitimasi sosial. Interaksi yang berlangsung antara elemen tersebut secara bertahap membentuk kesamaan cara pandang mengenai bagaimana perbedaan etnis dan agama seharusnya disikapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini memperlihatkan bahwa internalisasi berlangsung melalui pengalaman kolektif, bukan semata melalui penyampaian informasi. Para informan tidak lagi memaknai moderasi beragama sebagai istilah yang bersifat administratif atau sebagai kebijakan pemerintah semata, tetapi sebagai pedoman bersama dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Pergeseran ini menunjukkan bahwa nilai moderasi mulai mengalami proses internalisasi ke dalam kesadaran sosial

²³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Anchor Books, 1966), hlm. 84-92.

Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai internalisasi nilai yang selama ini lebih banyak dijelaskan dalam konteks pendidikan atau kebijakan. Dalam penelitian ini, internalisasi dipahami sebagai hasil interaksi sosial yang berlangsung secara berulang sehingga membentuk orientasi tindakan masyarakat. Dengan demikian, moderasi beragama tidak hanya dipelajari, tetapi dipraktikkan sebagai norma kehidupan bersama.

Dalam perspektif Berger dan Luckmann,²⁴ internalisasi merupakan tahap ketika realitas sosial yang sebelumnya dikonstruksi dan memperoleh objektivasi diterima kembali oleh individu sebagai bagian dari cara mereka memahami dunia sosial. Pada tahap ini, nilai tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari luar diri, melainkan menjadi bagian dari orientasi berpikir dan bertindak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses tersebut berlangsung melalui pengalaman dialogis yang berulang. Masyarakat tidak hanya mendengar penjelasan mengenai pentingnya moderasi beragama, tetapi juga menyaksikan bagaimana nilai tersebut dipraktikkan oleh berbagai aktor yang memiliki latar belakang berbeda. Pengalaman sosial semacam ini memperkuat proses internalisasi karena nilai dipahami melalui praktik nyata, bukan hanya melalui penyampaian normatif.

Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa internalisasi tidak berlangsung secara individual, melainkan melalui proses sosial yang bersifat intersubjektif. Ketika para peserta forum mendengar pandangan tokoh agama, pemerintah, dan tokoh masyarakat yang sama-sama menekankan pentingnya menjaga harmoni, mereka tidak sekadar menerima informasi baru, tetapi mulai membangun keyakinan bahwa nilai tersebut memang menjadi orientasi bersama masyarakat. Dengan demikian, internalisasi dalam konteks penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari proses dialog dan interaksi yang memungkinkan terbentuknya pengakuan bersama terhadap suatu nilai.

Perkembangan tersebut kemudian mengarah pada terbentuknya apa yang

²⁴ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, NY: Anchor Books, 1966), 129–146.

oleh Durkheim disebut sebagai *collective conscience*.²⁵ Menurut Durkheim, masyarakat dapat mempertahankan keteraturan apabila anggotanya memiliki seperangkat nilai moral yang dipahami dan diakui secara bersama. Dalam penelitian ini, kesadaran kolektif tersebut tampak pada berkembangnya pandangan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya merupakan kepentingan kelompok tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh warga desa. Dengan kata lain, nilai moderasi beragama telah mengalami transformasi dari keyakinan individual menjadi komitmen sosial yang memperoleh legitimasi moral.

Data lapangan memperlihatkan bahwa berbagai aktor menggunakan narasi yang relatif serupa ketika menjelaskan tujuan Program Desa Sadar Kerukunan. Unsur pemerintah menekankan pentingnya kerukunan sebagai prasyarat pembangunan sosial. Tokoh-tokoh agama memandang moderasi sebagai jalan untuk menjaga ukhuwah dan menghormati keberagaman tanpa mengurangi komitmen terhadap ajaran agama masing-masing. Tokoh masyarakat melihat kerukunan sebagai modal utama untuk mempertahankan kehidupan desa yang aman dan kondusif. Meskipun lahir dari latar belakang institusional yang berbeda, seluruh narasi tersebut bertemu pada satu orientasi yang sama, yaitu pentingnya menjadikan harmoni sosial sebagai kepentingan kolektif. Kesamaan orientasi inilah yang menunjukkan mulai terbentuknya *collective conscience*.

Interpretasi ini memperluas pembacaan terhadap Durkheim.²⁶ Dalam formulasi klasiknya, *collective conscience* sering dipahami sebagai fondasi moral yang menopang keteraturan sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran kolektif tersebut tidak muncul secara spontan ataupun semata-mata diwariskan melalui tradisi. Sebaliknya, ia dibentuk melalui proses komunikasi, dialog, dan pengalaman kolaboratif yang memungkinkan masyarakat merumuskan kembali makna kebersamaan dalam konteks kehidupan multietnis. Dengan demikian, *collective conscience* dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang terus direproduksi melalui interaksi antarpemangku kepentingan.

Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan Program

²⁵ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. W. D. Halls (New York: Free Press, 1984), 38–59.

²⁶ Émile Durkheim, *The Division of Labor in Society*, trans. W. D. Halls (New York: Free Press, 1984), 79–87.

Desa Sadar Kerukunan tidak hanya terletak pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama, tetapi pada kemampuannya membangun orientasi moral bersama yang menjadi dasar tindakan sosial. Pada titik ini, nilai moderasi tidak lagi hadir sebagai wacana normatif, melainkan telah berkembang menjadi standar bersama dalam memaknai hubungan antarwarga. Namun demikian, kesadaran kolektif tersebut masih merupakan potensi sosial. Agar mampu menghasilkan kohesi yang berkelanjutan, diperlukan hubungan sosial yang ditandai oleh kepercayaan, resiprositas, dan jejaring kolaboratif.²⁷ Dengan demikian, pembahasan selanjutnya diarahkan pada bagaimana modal sosial berkembang sebagai mekanisme yang menghubungkan kesadaran kolektif dengan tindakan bersama.²⁸

3. Modal Sosial sebagai Jembatan Menuju Kohesi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarkelompok di Desa Kerta Buana tidak hanya ditopang oleh sikap saling menghormati, tetapi juga oleh praktik-praktik sosial yang memperkuat kepercayaan, jaringan kerja sama, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunikasi yang berlangsung secara terbuka, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah membentuk hubungan sosial yang semakin erat di antara kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang agama maupun etnis.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa berkembangnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kerukunan tidak berhenti pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap keberagaman. Kesadaran tersebut secara bertahap memengaruhi pola hubungan antarwarga melalui meningkatnya kepercayaan, keterbukaan dalam komunikasi, serta kesediaan untuk bekerja sama dalam berbagai aktivitas sosial yang melibatkan kelompok etnis maupun agama yang berbeda. Dengan demikian, transformasi nilai moderasi beragama mulai memperoleh bentuk konkret dalam jaringan hubungan sosial yang menopang kehidupan masyarakat sehari-hari.

²⁷ James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94, Supplement (1988): S98–S105.

²⁸ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 19–28.

Dalam perspektif Coleman,²⁹ perubahan tersebut dapat dipahami sebagai berkembangnya modal sosial yang lahir dari struktur hubungan antarindividu. Coleman menjelaskan bahwa kepercayaan, kewajiban timbal balik, dan norma resiprositas memungkinkan masyarakat melakukan tindakan kolektif secara lebih efektif dibandingkan ketika hubungan sosial dibangun semata-mata atas dasar kepentingan individual. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa setelah masyarakat memiliki orientasi moral yang relatif sama mengenai pentingnya menjaga kerukunan, hubungan sosial antarkelompok menjadi lebih terbuka untuk membangun kerja sama. Dengan kata lain, kesadaran kolektif menyediakan dasar moral, sedangkan modal sosial menyediakan kapasitas relasional untuk mewujudkan dasar moral tersebut dalam tindakan nyata.

Perubahan tersebut tampak dari berkembangnya hubungan yang semakin cair di antara para aktor yang sebelumnya lebih banyak berinteraksi dalam lingkup komunitas masing-masing. Kehadiran forum Desa Sadar Kerukunan mempertemukan unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga dalam ruang komunikasi yang memungkinkan mereka saling mengenal, memahami kepentingan satu sama lain, serta membangun komitmen bersama. Hubungan yang pada awalnya bersifat formal secara bertahap berkembang menjadi relasi yang lebih personal dan penuh kepercayaan. Proses ini menunjukkan bahwa modal sosial dalam penelitian ini bukan merupakan modal awal (*initial condition*), melainkan hasil dari interaksi sosial yang terus direproduksi.

Interpretasi tersebut sejalan dengan Putnam,³⁰ yang menempatkan kepercayaan (*trust*), jejaring sosial (*networks*), dan norma resiprositas sebagai fondasi utama tindakan kolektif. Menurut Putnam, masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi akan lebih mudah mengembangkan partisipasi warga karena setiap individu memiliki keyakinan bahwa pihak lain juga berkomitmen terhadap tujuan bersama.³¹ Dalam konteks Desa Kerta Buana, temuan penelitian

²⁹ James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94, Supplement (1988): 95–120, khususnya S98–S104.

³⁰ Robert D. Putnam, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community* (New York: Simon & Schuster, 2000), hlm. 19–28.

³¹ Robert D. Putnam, "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century," *Scandinavian Political Studies* 30, no. 2 (2007): 147–150.

memperlihatkan bahwa kepercayaan tidak dibangun melalui kesamaan identitas etnis maupun agama, tetapi melalui pengalaman berinteraksi dan bekerja sama secara berulang dalam forum-forum kolaboratif. Oleh karena itu, kepercayaan yang berkembang lebih bersifat relasional daripada komunal, sehingga mampu menjangkau batas-batas identitas sosial yang ada di masyarakat.

Literatur modal sosial memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai karakter hubungan yang berkembang dalam kasus ini. Putnam terutama menekankan bonding dan bridging social capital, sedangkan literatur Woolcock memperluas pembacaan tersebut dengan perhatian pada linking social capital, yaitu hubungan vertikal antara masyarakat dan institusi yang memiliki sumber daya atau kewenangan. Dalam kasus Kerta Buana, ikatan internal komunitas (bonding) tetap menopang solidaritas kelompok; hubungan lintas agama dan etnis (bridging) memperluas kepercayaan antarkelompok; sementara keterlibatan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan memperkuat linking social capital. Ketiga bentuk hubungan ini diperlakukan sebagai perangkat analitis yang saling melengkapi, bukan sebagai kategori yang seluruhnya berasal dari satu penulis.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Desa Sadar Kerukunan tidak terutama ditentukan oleh kuatnya solidaritas internal masing-masing kelompok, melainkan oleh kemampuannya memperluas hubungan sosial melampaui batas identitas komunal. Dalam konteks masyarakat multietnis, hubungan lintas kelompok tersebut menjadi mekanisme penting yang memungkinkan nilai moderasi beragama berkembang menjadi praktik sosial yang inklusif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas argumentasi Woolcock,³² dengan menunjukkan bahwa *bridging* dan *linking social capital* tidak berkembang secara spontan, tetapi dibentuk melalui proses internalisasi nilai dan pembentukan kesadaran kolektif yang berlangsung sebelumnya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang diawali oleh pembentukan makna bersama, dilanjutkan dengan internalisasi nilai

³² Michael Woolcock, "The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes," *Canadian Journal of Policy Research* 2, no. 1 (2001): 13–16.

moderasi, dan berkembang menjadi kepercayaan serta jaringan kerja sama yang menopang kohesi sosial. Dengan demikian, modal sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai mata rantai yang menghubungkan nilai-nilai moderasi beragama dengan terbentuknya kohesi sosial masyarakat multietnis.

Lebih jauh lagi, analisis menunjukkan bahwa modal sosial yang berkembang tidak hanya meningkatkan intensitas hubungan antaraktor, tetapi juga mengubah kualitas hubungan tersebut. Kepercayaan yang semakin kuat melahirkan kesediaan untuk berbagi informasi, menyelesaikan persoalan secara musyawarah, serta mengembangkan berbagai bentuk kerja sama yang sebelumnya sulit dilakukan. Pada tahap ini, hubungan sosial tidak lagi sekadar menjadi saluran komunikasi, tetapi berubah menjadi sumber daya kolektif yang memungkinkan masyarakat menghadapi berbagai potensi perbedaan secara konstruktif.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa modal sosial bukanlah tujuan akhir dari proses transformasi yang sedang berlangsung. Sebaliknya, modal sosial merupakan mekanisme mediasi yang menjembatani kesadaran kolektif dengan lahirnya tindakan kolaboratif. Tanpa modal sosial, kesadaran moral berpotensi tetap berada pada tataran normatif. Sebaliknya, melalui kepercayaan, jejaring sosial, dan norma resiprositas, nilai moderasi beragama memperoleh saluran untuk diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan modal sosial sebagai tahap transisi yang menghubungkan dimensi kultural dengan dimensi kelembagaan dalam proses pembentukan kohesi sosial.

4. Collaborative Governance sebagai Mekanisme Pelembagaan Modal Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama di Desa Kerta Buana tidak hanya berlangsung melalui hubungan interpersonal masyarakat, tetapi juga memperoleh dukungan dari berbagai institusi seperti pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menciptakan ruang dialog, koordinasi, dan penyelesaian persoalan secara kolektif sehingga nilai-nilai moderasi memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembangnya kepercayaan, hubungan lintas kelompok, dan norma resiprositas dalam masyarakat tidak berlangsung secara spontan maupun bertahan dengan sendirinya. Modal sosial

yang telah terbentuk melalui proses internalisasi nilai memerlukan ruang sosial yang memungkinkan hubungan tersebut dipelihara, diperkuat, dan direproduksi secara berkelanjutan. Dalam konteks Desa Kerta Buana, ruang tersebut diwujudkan melalui berbagai forum kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dalam proses dialog yang berlangsung secara reguler. Dengan demikian, forum Desa Sadar Kerukunan tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi berfungsi sebagai institusi sosial yang menjaga keberlangsungan hubungan antaraktor.

Temuan tersebut selaras dengan perspektif *collaborative governance*³³ yang dikembangkan Ansell dan Gash, yang memandang bahwa penyelesaian persoalan publik memerlukan keterlibatan pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara bersama.³⁴ Perspektif tersebut kemudian diperluas oleh Emerson dan Nabatchi, yang menekankan pentingnya dinamika kolaborasi yang menghasilkan kapasitas tindakan bersama (*capacity for joint action*).³⁵

Perspektif *collaborative governance* yang dikembangkan Ansell dan Gash memberikan kerangka yang relevan untuk memahami proses tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif tidak diawali oleh kesepakatan formal, melainkan oleh dialog tatap muka yang memungkinkan para aktor membangun kepercayaan dan saling memahami kepentingan masing-masing. Dalam penelitian ini, proses tersebut tampak ketika berbagai pihak yang memiliki latar belakang kelembagaan dan keagamaan berbeda memperoleh kesempatan untuk mendiskusikan persoalan kerukunan dalam suasana yang setara. Dialog tersebut tidak diarahkan untuk menyeragamkan pandangan keagamaan, tetapi untuk menemukan titik temu mengenai kepentingan bersama dalam menjaga harmoni sosial.

Penelitian mengenai moderasi beragama di Indonesia telah banyak menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat

³³ Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): khusus hlm. 544–548.

³⁴ Chris Ansell and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 548–550.

³⁵ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 4–9.

dalam membangun kehidupan yang harmonis.³⁶ Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih mendeskripsikan bentuk kolaborasi yang terjadi, sementara mekanisme bagaimana kolaborasi tersebut mengubah nilai moderasi menjadi norma sosial yang dihayati masyarakat belum banyak dijelaskan.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa *collaborative governance* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi kelembagaan, tetapi juga sebagai proses pelebagaan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, nilai-nilai tersebut memperoleh legitimasi sosial, direproduksi dalam berbagai aktivitas bersama, dan akhirnya menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, *collaborative governance* dalam penelitian ini dipahami sebagai mata rantai institusional yang memperkuat proses transformasi dari moderasi beragama menuju kohesi sosial.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa kehadiran unsur Kementerian Agama, KUA, MUI, pemerintah desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat memberikan legitimasi sekaligus memperluas jangkauan proses dialog. Para informan memandang keterlibatan berbagai institusi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai. Persepsi ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak dipahami sebagai hubungan administratif antarlembaga, melainkan sebagai komitmen kolektif yang dibangun melalui interaksi sosial yang berulang. Dengan demikian, forum kolaboratif menghasilkan rasa saling percaya yang melampaui batas kewenangan formal masing-masing aktor.

Interpretasi tersebut sejalan dengan konsep *collaborative dynamics* yang dikembangkan Emerson, Nabatchi, dan Balogh.³⁷ Mereka menjelaskan bahwa kolaborasi yang berkelanjutan berkembang melalui tiga dimensi utama, yaitu

³⁶ Lihat misalnya, Misbah Khoiruddin Zuhri et al, "Tolerance From Below: Grassroots Movement and Interfaith Collaboration for Religious Moderation in Indonesia", *Jurnal Penelitian*, 21(1) (2024): 1-16.

³⁷ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 4–9.

principled engagement,³⁸ *shared motivation*,³⁹ dan *capacity for joint action*.⁴⁰

Dalam penelitian ini, *principled engagement* tampak pada terbentuknya ruang dialog yang memberi kesempatan kepada setiap aktor untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai kehidupan masyarakat multietnis. Proses tersebut kemudian melahirkan *shared motivation*, yaitu berkembangnya rasa saling percaya, penghormatan, dan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan. Selanjutnya, motivasi bersama tersebut memperkuat *capacity for joint action* melalui keterlibatan aktif berbagai aktor dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang harmonis.

Yang menarik, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif tidak hanya menghasilkan koordinasi kelembagaan, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Ketika tokoh agama, pemerintah, dan tokoh masyarakat secara konsisten menyampaikan pesan yang saling menguatkan mengenai pentingnya menghormati perbedaan, masyarakat memperoleh pengalaman konkret bahwa moderasi beragama bukan hanya wacana normatif, tetapi telah menjadi praktik sosial yang dijalankan secara bersama. Pada titik ini, forum kolaboratif berfungsi sebagai media reproduksi nilai yang memperkuat keberlangsungan *collective conscience* dan modal sosial yang telah terbentuk sebelumnya.

Temuan tersebut memberikan perluasan terhadap perspektif *collaborative governance*.⁴¹ Ansell dan Gash maupun Emerson dan Nabatchi terutama, menjelaskan kolaborasi sebagai mekanisme penyelesaian persoalan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat multietnis, kolaborasi memiliki fungsi yang lebih mendasar, yaitu sebagai mekanisme pelestarian nilai. Melalui proses dialog yang berlangsung secara berulang, nilai

³⁸ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 6–7.

³⁹ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 7–8.

⁴⁰ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 8–9.

⁴¹ Lihat terutama Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 6–9.

moderasi beragama tidak hanya dikomunikasikan, tetapi juga dilegitimasi, direproduksi, dan ditanamkan kembali ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, forum kolaboratif menjadi institusi yang menjaga kesinambungan proses transformasi dari nilai menuju tindakan kolektif.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa kohesi sosial tidak muncul sebagai akibat langsung dari keberadaan modal sosial maupun dari pelaksanaan program pemerintah semata. Kohesi sosial merupakan hasil dari proses pelebagaan hubungan sosial yang memungkinkan kepercayaan, norma resiprositas, dan komitmen bersama terus dipelihara dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan Desa Sadar Kerukunan lebih tepat dipahami sebagai keberhasilan membangun institusi sosial yang mereproduksi kohesi, bukan sekadar keberhasilan melaksanakan kegiatan.

Dengan demikian, *collaborative governance* dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai tahap akhir, melainkan sebagai mekanisme yang memastikan seluruh proses sebelumnya—konstruksi makna, internalisasi nilai, pembentukan kesadaran kolektif, dan penguatan modal sosial—tetap berlangsung secara berkesinambungan. Pada tahap inilah transformasi nilai moderasi beragama mulai memperlihatkan bentuknya sebagai kohesi sosial yang relatif stabil dalam kehidupan masyarakat multietnis.

5. Mekanisme Transformasi Sosial Menuju Kohesi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesi sosial di Desa Kerta Buana tidak terbentuk melalui satu faktor tunggal, melainkan melalui rangkaian proses sosial yang saling berkaitan. Nilai-nilai moderasi beragama mula-mula dikonstruksi sebagai makna bersama melalui interaksi antaraktor, kemudian diinternalisasi menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Norma tersebut berkembang menjadi kesadaran kolektif yang memperkuat kepercayaan, jaringan kerja sama, dan partisipasi sosial. Dalam tahap berikutnya, berbagai institusi lokal memberikan legitimasi dan ruang reproduksi bagi nilai-nilai tersebut sehingga akhirnya terwujud dalam bentuk kohesi sosial yang relatif stabil di tengah keberagaman etnis dan agama.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, konsep *collective conscience* Durkheim, teori modal sosial Coleman, Putnam, dan Woolcock, serta perspektif *collaborative governance*

Ansell dan Gash, Emerson dan Nabatchi tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan transformasi nilai menjadi realitas sosial. Setiap perspektif menjelaskan tahapan yang berbeda dalam satu proses sosial yang utuh.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa moderasi beragama berkontribusi terhadap peningkatan toleransi, harmoni, ataupun kohesi sosial. Akan tetapi, hubungan tersebut lebih banyak dijelaskan sebagai hubungan langsung antara dua kondisi sosial.⁴² Penelitian ini memperlihatkan bahwa hubungan tersebut sesungguhnya berlangsung melalui serangkaian mekanisme sosial yang melibatkan pembentukan makna, internalisasi nilai, kesadaran kolektif, modal sosial, dan kolaborasi kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertentangan dengan temuan-temuan sebelumnya, tetapi memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses yang menghubungkan moderasi beragama dengan kohesi sosial.⁴³

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara moderasi beragama dan kohesi sosial tidak berlangsung secara langsung maupun linear. Sebaliknya, transformasi tersebut terjadi melalui serangkaian mekanisme sosial yang saling berkaitan, dimulai dari konstruksi makna, internalisasi nilai, pembentukan kesadaran kolektif, penguatan modal sosial, hingga pelebagaan hubungan kolaboratif dalam kehidupan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama bekerja sebagai nilai normatif awal, sedangkan kohesi sosial merupakan hasil sosial yang lahir melalui proses transformasi yang berlangsung secara bertahap.

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini sesungguhnya telah menjelaskan setiap tahapan tersebut secara parsial. Berger dan Luckmann menjelaskan bagaimana suatu nilai dikonstruksi melalui interaksi sosial sehingga

⁴² Bandingkan dengan Ibnu Sholeh & Siti Fatinnah, "Strengthening Religious Moderation to Promote Social Cohesion and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies," *MUNIF: International Journal of Religion Moderation*, 1(1) (2025): 1–19; Muhammad Maulana et al, "Unity in Diversity: Examining Religious Moderation across Religions in Indonesia," *Dialog* 47, no. 1 (2024): 62–64; Achmad Abidin & Izzul Fatawi, "Leadership of Religious Leaders in the Framework of Religious Moderation in Strengthening Community Social Cohesion," *IJMURHICA*, 7(4) (2024): 266–277; Rasyidi, Saiban, & Rozikin, "Building an Inclusive Society through Religious Moderation Village: Phenomenological Study of the Role of Social Capital in Building Social Harmonization in the Community of Sidodadi Village," *IJRSS* 6(6) (2025): 151-175.

⁴³ Bandingkan dengan artikel-artikel terdahulu yang memang telah kami kaji pada pendahuluan.

memperoleh makna bersama. Durkheim menerangkan bagaimana makna tersebut berkembang menjadi *collective conscience* yang memberikan legitimasi moral bagi tindakan masyarakat. Coleman, Putnam, dan Woolcock menunjukkan bahwa kesadaran moral hanya dapat diwujudkan dalam tindakan apabila didukung oleh jaringan kepercayaan, norma resiprositas, dan hubungan sosial yang produktif. Selanjutnya, Ansell dan Gash serta Emerson, Nabatchi, dan Balogh menjelaskan bahwa hubungan sosial tersebut memerlukan mekanisme kolaboratif agar mampu dipelihara dan dikembangkan menjadi tindakan kolektif yang berkelanjutan.

Temuan empiris penelitian memperlihatkan bahwa seluruh tahapan tersebut hadir secara berurutan dalam implementasi Program Desa Sadar Kerukunan di Desa Kerta Buana. Forum dialog yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga menjadi ruang bagi berlangsungnya konstruksi makna mengenai pentingnya hidup rukun dalam masyarakat multietnis. Makna yang dibangun melalui dialog tersebut kemudian mengalami proses internalisasi sehingga berkembang menjadi orientasi moral bersama yang menempatkan kerukunan sebagai tanggung jawab kolektif. Kesadaran kolektif tersebut selanjutnya memperkuat hubungan sosial melalui berkembangnya kepercayaan, resiprositas, dan kerja sama lintas kelompok. Pada tahap berikutnya, hubungan sosial tersebut memperoleh bentuk kelembagaan melalui forum kolaboratif yang secara berkelanjutan mereproduksi nilai moderasi beragama dalam praktik kehidupan masyarakat.

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris dan kajian teoretis, penelitian ini mengajukan Moderation Internalization through Desa Sadar Kerukunan (MIDSK) Framework sebagai kerangka eksplanatoris berbasis kasus mengenai transformasi moderasi beragama menuju kohesi sosial. Moderasi beragama diposisikan sebagai sumber nilai (normative input) dan kohesi sosial sebagai luaran (social outcome). Hubungan keduanya dijelaskan melalui empat mekanisme yang saling berhubungan: (1) konstruksi dan internalisasi nilai, (2) pembentukan kesadaran kolektif, (3) penguatan modal sosial, dan (4) pelebagaan kolaborasi. Kerangka ini tidak mengasumsikan hubungan langsung, melainkan menjelaskan proses sosial yang memediasi perubahan dari nilai normatif menjadi praktik kolektif.

Tabel 1
Sintesis Mekanisme Transformasi dalam MIDSK Framework

Tahap	Mekanisme Utama	Indikator Analitis	Lensa Teoretis	Luaran Antara
1	Konstruksi makna bersama	Dialog, negosiasi makna, definisi bersama tentang kerukunan	Berger & Luckmann	Makna bersama
2	Internalisasi dan kesadaran kolektif	Penerimaan nilai sebagai orientasi moral dan tanggung jawab bersama	Berger & Luckmann; Durkheim	Norma/kesadaran kolektif
3	Penguatan modal sosial	Kepercayaan, resiprositas, jejaring lintas kelompok dan hubungan dengan institusi	Coleman; Putnam; Woolcock	Kapasitas relasional
4	Pelembagaan kolaborasi	Dialog terorganisasi, koordinasi, komitmen proses, kapasitas tindakan bersama	Ansell & Gash; Emerson et al.	Reproduksi nilai dan tindakan kolektif
Outcome	Kohesi sosial	Rasa memiliki, solidaritas, kerja sama, dan kemampuan mengelola perbedaan	Sintesis MIDSK	Kohesi sosial yang dipelihara

Dengan demikian, MIDSK Framework menempatkan internalisasi sebagai titik sentral transformasi. Nilai moderasi beragama tidak menghasilkan perubahan sosial hanya karena disosialisasikan atau dipahami secara kognitif, tetapi karena nilai tersebut dihayati sebagai orientasi moral, diterjemahkan ke dalam hubungan sosial, kemudian dipelihara melalui institusi kolaboratif yang memungkinkan reproduksi nilai berlangsung secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini, kohesi sosial bukan dipahami sebagai kondisi statis, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang terus dipelihara melalui interaksi antarpemangku kepentingan.

Kontribusi konseptual tersebut berbeda dari pembacaan yang menempatkan moderasi beragama dan kerukunan terutama sebagai hubungan pada tingkat hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut dimediasi oleh proses: keberhasilan moderasi bergantung pada pembentukan makna, internalisasi, kesadaran kolektif, penguatan modal sosial, dan tata kelola kolaboratif. Karena itu, efektivitas program penguatan moderasi tidak cukup dibaca dari intensitas kegiatan atau partisipasi, tetapi juga dari kapasitas program membangun mekanisme transformasi sosial yang dapat dipelihara secara berkelanjutan.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah perlunya melihat moderasi beragama tidak hanya sebagai wacana normatif atau kebijakan publik, tetapi sebagai proses institusional yang menghasilkan perubahan sosial melalui mekanisme yang dapat dijelaskan secara empiris. Dengan demikian, MIDSK Framework tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori-teori yang telah ada, melainkan mengintegrasikan kontribusi masing-masing teori ke dalam satu

kerangka penjelasan yang lebih utuh mengenai transformasi nilai menjadi kohesi sosial dalam masyarakat multietnis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kohesi sosial dalam masyarakat multietnis tidak terbentuk sebagai konsekuensi langsung dari implementasi moderasi beragama, tetapi melalui suatu mekanisme transformasi sosial yang berlangsung secara bertahap. Berdasarkan temuan pada kasus Desa Kerta Buana, nilai-nilai moderasi beragama terlebih dahulu dikonstruksi sebagai makna bersama melalui interaksi sosial, kemudian diinternalisasi menjadi norma yang diterima masyarakat, berkembang menjadi kesadaran kolektif, memperkuat modal sosial, dan dilembagakan melalui kolaborasi berbagai aktor sebelum termanifestasi dalam bentuk kohesi sosial.

Kontribusi utama penelitian terletak pada penjelasan konseptual mengenai mekanisme yang menghubungkan moderasi beragama dengan kohesi sosial. MIDSJ Framework mengintegrasikan konstruksi sosial, kesadaran kolektif, modal sosial, dan collaborative governance ke dalam penjelasan bertahap mengenai transformasi nilai menjadi praktik sosial. Secara praktis, temuan mengisyaratkan bahwa pengelola program Desa Sadar Kerukunan perlu memberi perhatian tidak hanya pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga pada ruang dialog, pembentukan kepercayaan lintas kelompok, jaringan kolaboratif, dan keberlanjutan institusi yang mereproduksi nilai moderasi. Karena penelitian bertumpu pada satu kasus strategis dan diarahkan pada analytic generalization, temuan tidak dimaksudkan sebagai representasi statistik seluruh desa multietnis. Penelitian lanjutan perlu menguji transferabilitas MIDSJ Framework melalui studi lintas kasus, konteks kelembagaan, dan konfigurasi keragaman yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Achmad, and Izzul Fatawi. "Leadership of Religious Leaders in the Framework of Religious Moderation in Strengthening Community Social Cohesion." *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)* 7, no. 4 (2024): 266–277. <https://doi.org/10.24036/ijmurhica.v7i4.238>.

- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books, 1966.
- Coleman, James S. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* 94 (1988): S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labor in Society*. Translated by W. D. Halls. New York: Free Press, 1984.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (2012): 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Roadmap Penguatan Moderasi Beragama 2020–2024*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2022.
- Liu, Yaoping, Chatchai Rakthin, and Langgeng Budianto. "Religious Moderation and Community Cohesion: Exploring Social Memory, Identity, and Solidarity in the Phu Khao Thong Muslim Community, Ayutthaya." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 1 (2025): 379–392. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art10>.
- Maulana, Muhammad, N. N. A. Putri, and Z. Fahira. "Unity in Diversity: Examining Religious Moderation across Religions in Indonesia." *Dialog* 47, no. 1 (2024): 61–76. <https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.910>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2015.
- Pratiwi, N. N., and P. A. Suniadewi. "Navigating Common Good for Religious Moderation in Indonesia's Multicultural." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 4, no. 1 (2024): 119–129. <https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.437>.
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- Putnam, Robert D. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster, 2000.

Putnam, Robert D. "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century." *Scandinavian Political Studies* 30, no. 2 (2007): 137–174.

Rasyidi, K. S., and Z. Rozikin. "Building an Inclusive Society through Religious Moderation Village: Phenomenological Study of the Role of Social Capital in Building Social Harmonization in the Community of Sidodadi Village." *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 6, no. 6 (2025): 151–175. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2025.6.10>.

Seniawati et al. "The Framework of Religious Moderation: A Socio-Theological Study on the Role of Religion and Culture from Indonesia's Perspective." *Social Sciences & Humanities Open* (2025). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101271>.

Sholeh, M. I., and S. Fatinnah. "Strengthening Religious Moderation to Promote Social Cohesion and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies." *MUNIF: International Journal of Religion Moderation* 1, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.71305/munif.v1i1.442>.

Stake, Robert E. *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 1995.

Wardah, D. "Building Religious Moderation through Strengthening Mawaddah-Based Social Cohesion in Cigugur District, Kuningan Regency." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 4, no. 2 (2024): 124–141. <https://doi.org/10.24235/sejati.v4i2.86>.

Woolcock, Michael. "Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework." *Theory and Society* 27, no. 2 (1998): 151–208. <https://doi.org/10.1023/A:1006884930135>.

Yazwardi, Y., S. Wijaya, and Erniwati. "Negotiating Religious Moderation and Legal Pluralism in Indonesia: A Socio-Anthropological Perspective." *Kuriositas* 18, no. 1 (2025): 49–70. <https://doi.org/10.35905/kur.v18i1.12106>.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2018.

Zuhri, M. K., et al. "Tolerance From Below: Grassroots Movement and Interfaith Collaboration for Religious Moderation in Indonesia." *Jurnal Penelitian* 21, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.28918/jupe.v21i1.2085>.